



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SUB UNIT KERJA : BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN UKM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HANA ROICHATI
2. Jabatan : KEPALA BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN UKM
3. NHK : 210521

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 470.554.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/230 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 361.840.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/50 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 83.714.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/20 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 455.000.000

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. MOBIL, SUZUKI SX4 MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOBIL, INOVA STATION WAGON Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 140.700.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.163.115.379**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 2.229.369.379**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.229.369.379

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **7 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.